PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

UNIT KERJA : **BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIS WIDAGDO**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **867913**

II. DATA HARTA

A.	**TANAH DAN BANGUNAN**	**Rp.**	**626.000.000**
	1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/94 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000		
	2. Tanah dan Bangunan Seluas 56 m2/45 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
B.	**ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**	**Rp.**	**342.000.000**
	1. MOTOR, N-MAX 20P-RA/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000		
	2. MOTOR, CBR H5CO2R2OM1M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
	3. MOTOR, PCX FLC02032LOAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000		
	4. MOBIL, INOVA KIJANG INOVA 2.0 GM/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000		
C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**----**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**10.000.000**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**978.000.000**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	**Rp.**	**978.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI
JALAN WAN AMIR NO. 1 KELURAHAN PANGKALAN SESAI KECAMATAN DUMAI BARAT
KOTA DUMAI PROVINSI RIAU 28824
TELEPON (0765) 4302660 (LACAK), FAKSIMILE (0765) 4302660
LAMAN www.kkp.go.id SUREL politeknik.kpdumai@kkp.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B.2856/POLTEK.DUM/KP.120/XI/2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Juniawan Preston Siahaan, A.Pi.,M.T.
NIP : 197506012005021001
Jabatan : Direktur
Instansi : Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai

Dengan ini menyatakan bahwa saya menjabat sebagai Direktur Politeknik KP Dumai pada bulan Agustus 2025 dan belum melaporkan LHKPN. Sehingga LHKPN yang diumumkan adalah LHKPN Direktur sebelumnya yaitu Bapak Dr. Aris Widagdo, A.Pi., M.Si yang menjabat pada periode Agustus 2023 s.d Agustus 2025.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Dumai, 19 November 2025

Yang membuat pernyataan,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Juniawan Preston Siahaan A.Pi., M.T
NIP.197506012005021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara